

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengkaji kewenangan kepolisian dalam menggunakan tindakan tembak di tempat sebagai upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana begal, 2) Bagaimana pertanggungjawaban atas pelaksanaan perintah tembak di tempat oleh anggota Kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepolisian untuk menggunakan tindakan tembak di tempat dalam situasi tertentu telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2 serta Pasal 18 ayat 1. Namun, implementasi kewenangan ini memerlukan pertimbangan yang cermat agar tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tindakan preventif ini, termasuk peningkatan koordinasi antarinstansi, pelatihan yang memadai, dan kesadaran masyarakat. Dalam konteks penanggulangan begal, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang potensi dan tantangan yang terlibat dalam penggunaan kewenangan tembak di tempat oleh kepolisian. Implikasi dari penelitian ini dapat membantu penyusunan kebijakan dan panduan operasional yang lebih baik dalam memerangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga meningkatkan tingkat keamanan dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini mempertimbangkan aspek-aspek hukum, etika, dan implikasi sosial dari penggunaan kewenangan ini. Saran dari penelitian ini 1) Setiap anggota Polri harus memahami aturan teknis pelaksanaan kewenangan agar tidak melanggar hukum, 2) Kewenangan diskresi harus sesuai pada situasi tertentu seperti wilayah yang rawan dengan konflik.

Kata Kunci: *kewenangan, tembak di tempat, kepolisian*

ABSTRACT

The crime of violent theft, better known as begal, poses a serious threat to public security. This study aims to examine the authority of the police to use shooting on the spot as a preventive effort in tackling violent crimes. The research methods used are legal document analysis and literature study. The results showed that the authority of the police to use shooting on the spot in certain situations has been regulated in applicable laws and regulations. However, the implementation of this authority requires careful consideration so as not to violate human rights and principles of justice. The study also identified factors influencing the effectiveness of these preventive measures, including improved interagency coordination, adequate training, and public awareness. In the context of begal countermeasures, this study provides a deep insight into the potential and challenges involved in the use of shoot-on-the-spot authority by police. The implications of this research can help develop better policies and operational guidelines in combating violent theft, thereby increasing the level of security and protection of the community. This study considers the legal, ethical, and social implications of using this authority. The conclusion of this study provides a more comprehensive view of the role of the police force in protecting the public from criminal acts and the extent to which the act of shooting on the spot is in accordance with the principles of law and justice.

Keywords: *authority, shoot on the spot, police*